

PERAN DAN KONTRIBUSI TOKOH ISLAM INDONESIA DALAM PROSES RESOLUSI KONFLIK

Badrus Sholeh

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412 Jakarta Selatan
E-mail: badrus_sholeh@yahoo.co.id

Abstract: The Role and Contribution of Indonesian Muslim Leader in the process of Conflict Resolution. Indonesian Muslims have effectively taken a part in mediation, peace building and conflict resolution in Indonesia, Southeast Asia and the World. Some leaders like Abdurrahman Wahid, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Muhammad Yusuf Kalla, and Ali Alatas have been popularly mediators and peace makers among varieties of religious, ethnic and political groups, which have involved in conflicts and violence. The writer argues that their active role in peace building is not only because of their leadership ability but also because of their identity as Indonesian, moderate, and open minded Muslims. They have represented the values of Islam, which promoting peace for the human being in the World.

Keywords: Muslim leadership, conflict resolution, Islamic value, and peace.

Abstrak: Peran dan Kontribusi Tokoh Islam Indonesia dalam proses Resolusi Konflik. Umat Islam Indonesia telah efektif mengambil bagian dalam mediasi, membangun perdamaian dan resolusi konflik di Indonesia, Asia Tenggara, dan Dunia. Beberapa tokoh seperti Abdurrahman Wahid, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Muhammad Yusuf Kalla, dan Ali Alatas telah menjadi mediator terkenal dan pembuat perdamaian antara berbagai agama, etnis, dan kelompok politik yang telah terlibat dalam konflik dan kekerasan. Penulis berpendapat bahwa peran aktif mereka dalam pembangunan perdamaian bukan hanya karena kemampuan kepemimpinan mereka tetapi juga karena identitas mereka sebagai bangsa Indonesia, moderat, dan orang Islam yang terbuka. Mereka telah mewakili nilai-nilai Islam yang mempromosikan perdamaian bagi manusia di Dunia.

Kata kunci: kepemimpinan Muslim, resolusi konflik, nilai Islam, dan perdamaian.

Pendahuluan

Kajian tentang negosiasi dan resolusi Konflik merupakan bagian penting dari studi hubungan internasional, khususnya terkait erat dengan diplomasi, perdamaian dan keamanan. Resolusi konflik merupakan bagian strategis untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas keamanan. Tidak mengejutkan, ketika Griffiths memasukkan pemikir studi perdamaian, Johan Galtung, sebagai satu di antara lima puluh pemikir utama Hubungan Internasional, khususnya dalam teori radikal/kritis.¹ Teori radikal/kritis, diilhami dari pemikiran tradisi Marxis, mengidealkan hubungan internasional antar negara yang memungkinkan untuk mengatasi kemungkinan ketidak-setaraan

sistem kapitalis global. Menurut penganut teori ini bahwa kita harus merefleksikan secara kritis atas kondisi sejarah yang menyebabkan ketimpangan, kekuatan-kekuatan material, ideologis dan potensi untuk perubahan radikal atas sistem demi terciptanya keseimbangan dunia yang lebih adil.²

Galtung lahir di Norwegia pada tahun 1930 berasal dari keluarga papan atas. Ayahnya adalah seorang dokter dan masuk dalam kamp konsentrasi oleh Jerman semasa Perang Dunia Kedua. Galtung sedikit banyak menjadikan Ayahnya sebagai model untuk mengkombinasikan keahlian dalam membantu mengatasi berbagai persoalan. Pengalaman Galtung semasa perang dunia kedua ini, mengarahkan dia untuk secara kuat berkomitmen mengatasi ketimpangan dan

¹ Martin Griffiths, *Fifty Key Thinkers in International Relations*, (London: Routledge, 1999), h. 129.

² Martin Griffiths, *Fifty Key Thinkers...*, h. 107.

kekerasan dunia. Galtung, oleh keluarganya, diharapkan mengikuti jejak Ayahnya sebagai seorang dokter, tetapi Galtung lebih memilih belajar Sosiologi, Matematika dan Filsafat di fakultas yang berbeda. Galtung kemudian menulis tentang isu keamanan dan perdamaian sejak awal studinya. Galtung membagi dunia ke dalam dua bagian: negara-negara pusat (*centre*) dan pinggiran (*periphery*), dan di dalam suatu negara terdapat juga wilayah pusat dan pinggiran. Bagian pinggiran krusial untuk menjaga struktur imperialism, yang Galtung definisikan sebagai 'sistem yang memecah kolektivitas dan menghubungkan satu dengan yang lain ke dalam hubungan 'harmony of interest (kesamaan kepentingan),' dan bagian lain dalam hubungan 'disharmony of interest (perbedaan kepentingan), atau *conflict of interest* (pertentangan kepentingan).³

Penelitian ini akan melihat bagaimana pengalaman tokoh Islam di Indonesia dalam mencegah terjadinya kekerasan dan konflik. Kekerasan dan konflik dalam konteks ini terdiri dari banyak wilayah: sesama Muslim, etnis dan agama, masyarakat dan negara dan antar institusi sosial-politik. Kerusuhan sering melibatkan sesama Muslim yang berbeda aliran, atau Muslim mayoritas dan Muslim minoritas. Dalam masalah etnis dan agama, kerusuhan atau ketegangan melibatkan Islam dan etnis minoritas, misalnya antara Muslim dan etnis Tionghoa. Sementara kerusuhan antara masyarakat dan negara disebabkan oleh kasus perdata yang melibatkan masyarakat dan perusahaan milik negara, misalnya advokasi dilakukan oleh beberapa ustadz muda dari Pesantren Salafiah Sya'fi'iyah Situbondo dalam memediasi masyarakat lokal di Situbondo yang digusur paksa oleh PTPN XII, perkebunan tebu milik perusahaan pemerintah. Tokoh agama juga dalam banyak kesempatan menengahi ketegangan antar organisasi Islam, dan antar partai berbasis masyarakat Muslim.

Fenomena Konflik di Indonesia

Riset yang dilakukan oleh LP3ES terhadap sepuluh pesantren di Indonesia di lima provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi

Selatan dan Nusa Tenggara Barat pada kurun waktu 2004 sampai 2005, yang disempurnakan menjadi buku berjudul *Budaya Damai Komunitas Pesantren*, terbit pada bulan Januari 2007, menunjukkan bahwa banyak tokoh agama—dalam konteks Islam—yang telah berperan dalam *conflict prevention* [pencegahan konflik] dan *conflict resolution* [resolusi konflik]. Pencegahan konflik berarti bahwa tokoh agama secara aktif melakukan upaya mencegah terjadinya kekerasan, kerusuhan dan konflik baik pada komunitasnya maupun di tempat lain. Partisipasi tokoh agama sangat mempengaruhi situasi damai di masyarakat karena mereka dijadikan 'contoh' dan 'cermin' dalam melakukan sesuatu. Diantaranya adalah peran Tuan Guru Turmudzi Badruddin, di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Januari 2001 menghimbau masyarakat Muslim untuk tidak ikut tabligh akbar di Mataram yang menyerukan pengiriman laskar ke Maluku, sebagai aksi solidaritas kerusuhan yang dianggap menewaskan banyak Muslim Maluku. Di Mataram, peristiwa ini disebut 'Kudatuli'. Konflik Maluku memang memberi dampak besar terhadap hubungan antar agama atau perubahan sikap Muslim terhadap non Muslim di Indonesia. Dalam kurun tahun 2000-2002, berbagai tabligh akbar dan khutbah Jum'at di Jawa, Sulawesi Selatan, NTB, Sumatera dan wilayah lain di Indonesia menyerukan solidaritas atas Muslim di Maluku dan Poso.

Di Indonesia, dalam kerusuhan Mei 1998, ketika sikap anti-Tionghoa memuncak, menjelang dan sesudah lengsernya Suharto, penguasa Orde Baru, berbagai tokoh pesantren juga menyerukan kepada santri dan komunitasnya untuk tidak ikut terprovokasi melakukan kerusakan dan pembakaran. Diantaranya adalah tokoh pesantren Al-Muayyad, dan Pesantren Al-Mukmin. Mereka menghimbau para santri untuk tidak ikut dalam kerusuhan Mei 1998, yang menurut riset departemen agama, menyebabkan kerugian lebih dari 18 milyar rupiah. Tetapi perlu mendapat catatan khusus bahwa santri dan alumni pesantren di berbagai tempat, banyak juga yang mudah terprovokasi untuk melakukan perusakan dan pembakaran atas aset toko, rumah dan mobil yang dianggap milik Tionghoa. Di Solo, salah satu obyek yang menjadi incaran amuk

³ Martin Griffiths, *Fifty Key Thinkers...*, h. 130.

massa adalah rumah milik 'kroni' Suharto, yaitu Harmoko. Menurut temuan ormas Islam, bahwa dalam berbagai kerusuhan pada akhir dan pasca runtuhnya Orde Baru terdapat kelompok yang terorganisir dalam memprovokasi massa.

Pada kerusuhan Situbondo dan Tasikmalaya 1996, ditengarai beberapa kelompok dari luar masyarakat Situbondo dan Tasikmalaya menggerakkan massa untuk melakukan membakaran terhadap rumah dan toko milik masyarakat Tionghoa dan kantor pemerintah, khususnya pos polisi, dan sekolah Kristen. Sayangnya, berbagai riset atas temuan peran pihak ketiga dalam berbagai kerusuhan dan konflik seringkali tidak tuntas, khususnya jika ditemukan keterlibatan kelompok tingkat tinggi, yang menyangkut elit Indonesia. Keberadaan Komnas HAM dan Komnas Perempuan bisa menjembatani 'ketakutan' masyarakat dalam menyelesaikan berbagai kerusuhan yang melibatkan kelompok elit. Tentu saja dibutuhkan independensi yang kuat atas suatu institusi penegakan Hak Asasi Manusia yang netral dan tidak tersentuh oleh eksekutif dan legislatif, atau institusi pemerintah lain. Terpilihnya sebelas anggota utama Komnas HAM pada 21 Juni 2007 diharapkan oleh masyarakat yang lelah menghadapi tekanan berulang kali pasca runtuhnya Orde Baru. Spirit demokrasi dan pemerintah yang bersih (*clean governance*) yang mendapat dukungan besar masyarakat akan menjadi modal besar untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat, independen, dan damai.

Modal sosial yang besar dan kuatnya institusi demokrasi merupakan landasan terciptanya masyarakat Indonesia yang dinamis. Tantangan terberat adalah masih banyaknya tingkat kemiskinan akibat krisis moneter yang panjang. Dalam pandangan Budiono, dalam pidato guru besarnya di UGM, menyebutkan bahwa apabila tekanan kemiskinan ini tidak diatasi dalam waktu cepat, maka fondasi sosial dan demokrasi akan runtuh dalam kurun dua dekade, dan menjadi ancaman terbentuknya masyarakat anarkhis dan anti-demokrasi.

Karena itu, penelitian ini menjadi sangat urgen dan strategis dalam mencermati dinamika masyarakat Indonesia dalam transisi demokrasi,

terutama bagaimana peran tokoh Muslim dalam menjaga keutuhan masyarakat, dan melakukan upaya damai baik dalam masyarakat yang sedang terlibat konflik, maupun mencegah terjadinya konflik laten yang sangat potensial di Indonesia.

Teori Resolusi Konflik: Peran Muslim Indonesia

Untuk memahami peran Muslim Indonesia dalam negosiasi dan resolusi konflik dibutuhkan pemahaman atas prinsip-prinsip dasar resolusi konflik, yang sesungguhnya telah dipraktekkan oleh tokoh Muslim dalam berbagai konflik sosial di Indonesia pasca Orde Baru. Kesepakatan damai bagi Muslim-Kristen Poso dalam Malino I (2001) dan Muslim-Kristen Maluku dalam perjanjian damai Malino II (2002) melibatkan banyak tokoh Muslim baik dari ormas Islam, seperti Muhammadiyah, NU dan lembaga pesantren maupun pemerintah yang direpresentasikan oleh Departemen Agama, Departemen Sosial dan Majelis Ulama Indonesia. Mereka secara intens melakukan negosiasi dan komunikasi untuk upaya perdamaian di Poso dan Maluku dengan tokoh-tokoh Kristen. Demikian juga dengan kerusuhan di Solo (1998), di Situbondo dan Tasikmalaya (1996) yang melibatkan negosiasi dan komunikasi dengan etnis dan agama yang berbeda, yaitu masyarakat Tionghoa dan Kristen, karena target kerusuhan adalah pertokoan milik pengusaha Tionghoa, juga Gereja dan sekolah Kristen.

Dalam negosiasi dan resolusi konflik prinsip persuasi menjadi hal penting yang dilakukan oleh para tokoh Muslim. Mereka menjadi mediator ulung secara arif dengan pendekatan *persuasi*, yang lebih mementingkan jalan damai dibandingkan metode ancaman atau demonstrasi untuk memaksa pihak lain mengikuti aspirasi suatu kelompok. Menurut Ledgerwood et.al. dalam *The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice* bahwa persuasi adalah upaya pendekatan yang bisa mengubah perilaku dan aksi dengan dasar saling percaya, dari kekerasan menuju perdamaian.⁴ Sementara negosiasi adalah proses

⁴ Alison Ledgerwood et. al. "Changing Minds: Persuasion in Negotiation and Conflict Resolution", dalam *The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*, editor Morton Deutsch, Peter T. Coleman dan Eric Colton Marcus, (San

yang dilakukan oleh satu atau lebih entitas secara bersama mendiskusikan masalah yang menjadi sumber konflik demi manfaat yang baik bagi kedua belah pihak.⁵ Dalam prakteknya, negosiasi lintas budaya seringkali melibatkan pendekatan agama, bahasa dan adat untuk mendapatkan solusi terbaik, demi kepentingan bersama menuju perdamaian.

Dalam banyak upaya perdamaian, tokoh Muslim Indonesia melakukan negosiasi dengan tokoh berbeda agama dan etnis dengan pendekatan lintas budaya untuk kepentingan bersama. Mereka masing-masing melakukan persuasi terhadap komunitas masing-masing, baik sebelum negosiasi maupun setelah dilakukan kesepakatan damai. Mereka adalah mediator bagi komunitas yang terlibat konflik. Tokoh adat dan agama dalam upaya perdamaian Malino II dan beberapa kesepakatan adat *pela gandong* di Maluku melakukan persuasi dan negosiasi. Representasi Muslim menginginkan pembaharuan kesepakatan damai secara adat (*panas pela*) tanpa melanggar rambu-rambu agama. Dalam sejarah perjanjian damai, masing-masing perwakilan komunitas meneteskan darah dalam semangkok air, dan diminum bersama sebagai simbol penghentian perang atau konflik. Dalam kesepakatan damai dalam konflik 1999-2002, cukup dengan menandatangani prinsip-prinsip dasar perdamaian yang menguntungkan kedua belah pihak.⁶

Sebagai bagian dari kelas menengah, tokoh Muslim memainkan posisi strategis dalam upaya perdamaian. Menurut Akbarzadeh dan Saeed bahwa tokoh Muslim sebagai bagian dari kelompok kelas Menengah Indonesia telah

memainkan peran dalam banyak hal diantaranya dialog lintas agama (*interfaith dialogue*), resolusi konflik dan kesetaraan gender.⁷ Mereka aktif dalam penguatan masyarakat sipil sejak masa Orde Baru, dan mendapatkan tempat strategis dalam penyelesaian kerusuhan dan konflik sosial pasca Orde Baru.

Gagasan Bassam Tibi dalam *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change* juga menarik untuk dipertimbangkan dalam memahami agama di tengah dinamika konflik dan transisi politik.⁸ Ekuivalen dengan interpretasi Tibi, agamawan Kamboja, sebagai suatu perbandingan dengan tokoh Muslim Indonesia, adalah salah satu di antara banyak contoh betapa elite agama memainkan posisi strategis dalam gerakan anti kekerasan dan pengembangan perdamaian. R. Scott Appleby dalam karyanya yang fenomenal *The Ambivalence of the Sacred Religion, Violence and Reconciliation*, sangat tajam menjelaskan pentingnya posisi agama.⁹ Appleby juga tetap menyadari adanya sisi radikalisme dan fundamentalisme yang muncul dalam masyarakat agama, tetapi bukan dari akar agama. Pemicunya adalah ekonomi dan politik.

Adalah Samdech Preah Maha Ghosananda, usia 68 tahun, seorang pendeta Buddha Kamboja, pada tahun 1993 memimpin ratusan pendeta, puluhan aktivis organisasi non-pemerintah (NGO) dan diikuti puluhan ribu penduduk untuk mendukung pesta demokrasi pertama di Kamboja pasca runtuhnya Khmer Rough. Setahun kemudian Ghosanda juga memimpin rekonsiliasi nasional diikuti oleh ratusan agamawan Buddha lainnya.¹⁰ Figur Ghosananda, posisinya sama dengan Mother Theresa (Kristen), Mahatma Gandhi (Hindu) dan

Francisco: Jossey-Bass, 2006), h. 456.

⁵ Robert T. Moran et.al. *Managing Cultural Differences: Global Leadership Strategies for the 21st Century*, (Oxford: Butterworth Heinemann, 2007), h. 80.

⁶ Secara umum Muslim lokal setuju atas segala upaya perdamaian. Tetapi Laskar Jihad memprovokasi masyarakat Muslim Maluku untuk tidak berhenti melakukan perlawanan dan menolak kesepakatan damai dengan masyarakat Kristen, yang sering mereka asosiasikan dengan RMS. Laskar Jihad menggunakan media radio, selebaran dan buletin yang secara masif mereka lakukan sejak 2001 hingga akhir 2002. Karena itu, dalam perjanjian Malino II, mereka tidak diikutkan mewakili komunitas Muslim yang dikhawatirkan akan mengancam proses mediasi dan negosiasi. Demikian juga, dalam upaya damai secara adat *Pela Gandong* dikategorikan oleh Laskar Jihad sebagai tradisi jahiliyah, yang bertentangan dengan syari'at Islam.

⁷ Shahram Akbarzadeh dan Abdullah Saeed (editor), *Islam and Political Legitimacy*, (Oxon: RoutledgeCurzon, 2003), h. 163.

⁸ Bassam Tibi, *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*, USA: Westview Press, 1990.

⁹ R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred Religion, Violence, and Reconciliation*. Pengantar Theodore M. Hesburgh, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2000.

¹⁰ R. Scott Appleby, *The Ambivalence...*, h. 123-124. Sekadar untuk memahami posisi Islam dalam resolusi konflik di tingkat internasional. Apendiks tentang konflik Moro, Mindanao, Filipina Selatan menarik untuk dibaca. Lihat, Ralph H. Salmi, Cesar Adib Majul dan George K. Tanham, *Islam and Conflict Resolution Theories and Practices*, Lanham: University Press of America, 1998.

Umar bin Khattab (Islam) dalam melakukan pembebasan sosial dari segala jenis otoritarian. Dalam aspek regional Indonesia; gerakan beberapa NGO, di antaranya LP3ES, di pesantren-pesantren pada tahun 1970-1980-an adalah upaya pembebasan dari bawah. Pencerahan pesantren dari ketertinggalan metodologi dan manajemen. Produk gerakan ini memunculkan generasi lapis tengah pesantren di antaranya Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Emha Ainun Najib, dan Muslim Abdurrahman yang memperkuat posisi pesantren sebagai *civil society* melawan kuatnya hegemoni negara. Tokoh-tokoh lain yang penting untuk dicermati dalam resolusi konflik dan gerakan perdamaian adalah M. Din Syamsuddin dan Ahmad Syafi'i Ma'arif (aktif dalam dialog antar agama), Husein Muhammad (kesetaraan gender), Tuan Guru Turmudzi Badruddin (pencegahan konflik di Lombok), Ulama Dayah di Aceh, diantaranya Tgk. H. Ibrahim Bardan (Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh) dalam mediasi antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM sebelum kesepakatan damai Helsinki 15 Agustus 2005, dan tokoh-tokoh agama dan adat di berbagai konflik, kekerasan dan kerusuhan di Indonesia.

Non-violence dan Peace Building

Bagaimana pula dengan peran tokoh Muslim dalam *peace-building* dan gerakan anti kekerasan (non-violence)? Beragamnya cakupan *peacemakers* dan kemungkinan peran tokoh Muslim di dalamnya akan memudahkan kita untuk melihat lebih dekat bagaimana elite komunitas Muslim dalam menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi sekitar mereka, atau lebih luas lagi. Apakah tokoh Muslim dan atau sebagian komunitasnya pernah memainkan peran dalam kasus di antaranya: diskriminasi ekonomi, pembelaan buruh, tekanan atas hak-hak rakyat, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), penghijauan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan mengutamakan upaya rekonsiliasi terhadap setiap persoalan daripada menghadapinya dengan kekerasan. Kuatnya peran tokoh Muslim di Jawa Tengah dalam menyelesaikan kasus Bendungan Kedung Ombo yang memakan korban 32 nyawa rakyat, di Jawa Timur dalam kasus kerusuhan Situbondo, di Sulawesi Selatan dalam membantu

pengungsi Muslim Makassar (BBM) dari Maluku, di Lombok dalam meredam kerusuhan Mataram, atau peran-peran lain dalam menciptakan hubungan multietnis dan agama lebih baik.

Masa Depan Perdamaian: Posisi Muslim Indonesia

Banyak tokoh Muslim Indonesia diakui secara internasional dalam mediasi dan pencegahan konflik, kekerasan dan ketegangan yang melibatkan kelompok dan masyarakat lintas negara. Disamping konflik lokal di Indonesia baik antar agama, etnis atau konflik melibatkan masyarakat dan negara. Di dunia internasional, konflik yang panjang antara Khmer Merah dan pemerintah Kamboja, Muslim di Mindanao dan Pemerintah Filipina, Muslim di Selatan Thailand dan Pemerintah Thailand, serta konflik dan upaya perdamaian di Timur Tengah dan Afrika. Beberapa nama yang akan dibahas dalam upaya perdamaian diantaranya Ali Alatas, Yusuf Kalla, KH. Abdurrahman Wahid, KH. Hasyim Muzadi, Prof. A. Syafi'i Ma'arif dan Prof. Din Syamsuddin. Banyak di antara aktivis perdamaian juga non Muslim Indonesia, tetapi tulisan ini akan fokus pada tokoh Muslim dan nilai-nilai keislaman yang mempengaruhi mereka dalam negosiasi dan resolusi konflik.

Ali Alatas, menteri luar negeri Indonesia selama empat periode kabinet antara 1987-1999, pada masa Soeharto dan B.J. Habibie. Ali Alatas lahir di Jakarta, 4 November 1932, alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1956 dan Akademi Dinas Luar Negeri 1956. Ali Alatas pernah dinominasikan oleh sejumlah negara Asia pada 1996 sebagai Sekjen PBB. Setidaknya dua kesepakatan damai di Kamboja (antara 1988 sampai dengan 1991) dan Filipina (antara 1993 sampai dengan 1996) dimediasi oleh Ali Alatas. Inisiatif pertama upaya mediasi yang dihadiri perwakilan kelompok yang bertikai di Kamboja, yaitu HRH Samdech Norodom Sihanouk--mewakili pemerintah Kamboja--dan H.E. Mr. Hun Sen--mewakili Kelompok Khmer Merah-, yang dilakukan di Bogor pada 25-28 Juli 1988, dengan istilah Jakarta Informal Meeting. Dalam pertemuan ini Ali Alatas menyatakan bahwa "any settlement, to be just and durable

should be attained through political means and not by force of arms”.¹¹ Setelah melalui beberapa pertemuan, perjanjian perdamaian dilakukan di Paris dalam The Paris International Conference on Cambodia, 23 Oktober 1991. Upaya perdamaian ini melibatkan juga PBB dan ASEAN sebagai organisasi internasional yang ikut memfasilitasi proses rekonsiliasi.

Selanjutnya, dalam menjembatani konflik antara MNLF (Morro National Liberation Front) dan Pemerintah Filipina, Ali Alatas memainkan peran penting dalam kesepakatan damai antara milisi Muslim dan pemerintah Filipina. Hingga saat ini MNLF tetap mentaati kesepakatan yang telah dilakukan dengan pemerintah. Atas permintaan kedua belah pihak yang bertikai, Ali Alatas memimpin proses rekonsiliasi yang dihadiri oleh Pemerintah Republik Filipina (GRP, Government of the Republic of the Philippines) dan Front Pembebasan Nasional Morro (MNLF, the Morro National Liberation Front) di Istana Bogor, 14 April 1993. Dalam proses rekonsiliasi, Ali Alatas menyatakan bahwa “Negosiasi yang baik membutuhkan semangat konsiliasi, konsesi yang saling menguntungkan dan keinginan untuk mencapai perdamaian dan solusi yang adil”.¹² Upaya perdamaian ini melanjutkan semangat Persetujuan Damai Tripoli 1976, dengan menciptakan otonomi luas dibawah integritas teritorial dan kedaulatan Filipina. Setelah lebih dari 70 kali pertemuan informal, disepakati sembilan area Otonomi: Perdamaian Nasional, Tentara Keamanan Regional, Pendidikan, Sistem Ekonomi dan Keuangan, Hasil pertambangan dan mineral, Sistem Administrasi, Representasi dalam Pemerintah Nasional, Lembaga legislatif dan eksekutif, dan peradilan dan pengenalan syari’ah Islam.¹³

Sayangnya, di Filipina Selatan banyak kelompok milisi terorganisasi yang tidak masuk dalam kesepakatan damai. Diantaranya adalah MILF (Morro Islamic Liberation Front) dan kelompok Abu Sayyaf (ASG, the Abu Sayyaf

Group). Bahkan MILF dan ASG memperkuat barisannya dengan melibatkan banyak kelompok milisi dari berbagai organisasi dan wilayah di Asia Tenggara. Fatchurrohman Al Ghozi, Dulmatin dan Umar Patek—ketiganya terlibat dalam Bom Bali 2002 adalah diantara Mujahidin dari Indonesia yang berjuang bersama MILF dan ASG. Fatchurrahman Al Ghozi meninggal di Filipina, menjadi korban dalam perburuan oleh tentara Filipina setelah lepas dari penjara. Dulmatin meninggal dalam operasi Densus 88 di Pamulang, Banten pada Maret 2010.¹⁴ Sementara Umar Patek masih menjadi target perburuan Densus 88 dan aparat keamanan beberapa negara di Asia Tenggara.

Demikian juga dengan Muhammad Yusuf Kalla, menjadi salah satu ikon penting dalam proses perdamaian baik dalam negeri maupun luar negeri. Kesepakatan damai antara Muslim dan Kristen Poso dalam Malino I (2001) dan Muslim-Kristen Maluku dalam Malino II (2002) tidak lepas dari peran utama Yusuf Kalla dalam mediasi dan rekonsiliasi komunitas Muslim dan Kristen. Perjanjian damai sangat berpengaruh dalam menurunnya eskalasi bentrokan antar dua komunitas berbeda agama. Bahkan ketika masih menjabat Wakil Presiden, Yusuf Kalla melakukan pencegahan aksi kekerasan menyusul kontak senjata antara Brimob Polri dan kelompok Tanah Runtuh Poso¹⁵ pada Oktober 2006. Yusuf Kalla meyakinkan masyarakat Muslim bahwa:

“Penegakan hukum yang dimaksud dalam Deklarasi Malino adalah terhadap kasus-kasus

¹⁴ Tentang Dulmatin, lihat ICG, *Indonesia: Jihadi Surprise in Aceh*, Asia Report No. 189- 20 April 2010, h. 7.

¹⁵ Kelompok Tanah Runtuh adalah sekelompok aktivis Muslim berasal dari Jawa, Sulawesi dan lokal Poso yang sebagian dianggap terkait dengan jaringan terorisme di Indonesia. Mereka tinggal di daerah Poso Kota, yang dikenal dengan wilayah Tanah Runtuh. Beberapa diantara mereka adalah anggota Jamaah Islamiah, yang aktif dalam aksi jihad ketika masa konflik Poso. Diantara aksi yang dilakukan adalah pembunuhan terhadap siswi Kristen, pendeta dan pemboman Tentena. Akibat tekanan pada 2006, banyak diantara mereka keluar dari Poso dan bergabung dengan Mujahidin di Jawa. Mereka umumnya dikenal dengan veteran Poso, melengkapi veteran Maluku dan veteran Afghanistan. Sebagian veteran ini tidak terlibat dalam aksi terorisme, mereka lebih fokus pada dakwah dan pemberdayaan ekonomi Muslim. Bagi mereka wilayah diluar Konflik Poso, Maluku dan Afghanistan, disamping Iraq dan Palestina adalah wilayah aman yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan medan Jihad (baca: perang).

¹¹ Ali Alatas, *A Voice for a Just Peace: A Collection of Speeches*, (Singapura-Jakarta: ISEAS dan Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 295.

¹² Ali Alatas, *A Voice for...*, h. 304.

¹³ Ali Alatas, *A Voice for...*, h. 310.

yang sudah terlanjur diproses hukum dan kasus-kasus setelah Deklarasi Malino... [karena itu] penyelidikan kasus-kasus terorisme yang terjadi dan telah diidentifikasi oleh Polri harus didukung dan dilaksanakan secara konsisten.”¹⁶

Dengan pengalaman mediasi dalam negeri, Yusuf Kalla yang menjabat Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai hasil Pemilu 2004 mencoba mendekati tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menghentikan upaya separatisme dengan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya dengan beberapa pertemuan negosiasi yang didukung dan difasilitasi oleh Uni Eropa, GAM dan Republik Indonesia melakukan kesepakatan damai pada 2005. Kesepakatan ini memberi kesempatan para pimpinan dan anggota GAM untuk aktif dalam politik dan kegiatan lain demi terwujudnya perdamaian dan kemakmuran masyarakat Aceh. Pada Pemilihan Gubernur 2006, representasi GAM (Irwandy Yusuf- mantan Juru bicara GAM) berhasil mengungguli tokoh-tokoh lain dan berhasil menjadi gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Bahkan dalam Pemilu 2009, GAM membuat partai lokal –yang berbeda dengan umumnya partai di Indonesia berpusat di Jakarta. Semula partai yang mewakili masyarakat GAM adalah Partai GAM, tetapi untuk menghindari kesan munculnya gerakan kembali GAM maka diubah menjadi Partai Aceh, yang juga mengungguli partai-partai lokal dan nasional lain di Nanggroe Aceh. Dengan demikian, GAM menguasai wilayah eksekutif dan legislatif. Hingga saat ini Yusuf Kalla tetap dipercaya oleh masyarakat Indonesia untuk mendamaikan ketegangan dan mencegah potensi konflik.

Pendekatan Ali Alatas dan Yusuf Kalla tentu saja tidak lepas dari karakter Muslim Indonesia yang moderat dan membuktikan Islam sebagai berkah bagi alam semesta. Yusuf Kalla seringkali merepresentasikan dirinya sebagai tokoh Nahdlatul Ulama dari Sulawesi Selatan. Dalam Muktamar NU di Makassar pada 2010, Yusuf Kalla hadir dan mendapat sambutan luar biasa dari peserta muktamar dan masyarakat

NU. Kharisma dan ketokohan Yusuf Kalla menjadi bagian penting dalam aktivitas dan langkah dalam menjaga perdamaian dan melakukan mediasi bagi kelompok-kelompok yang bertikai baik berbeda agama, etnis maupun politik.

Indonesia juga memiliki tokoh-tokoh Muslim yang aktif dalam perdamaian baik di kalangan masyarakat Indonesia maupun lintas negara. Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafi'i Ma'arif adalah di antara mereka yang aktif dalam pertemuan lintas agama dan negara untuk mewujudkan perdamaian global. Keduanya masing-masing pernah menjadi pemimpin tertinggi ormas Islam NU dan Muhammadiyah. Karena itu, tradisi perdamaian dan pola mediasi lintas agama tidak terlepas dari pengalaman mereka dalam memimpin dua ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut. Gus Dur baik sebelum dan sesudah menjadi Presiden RI telah aktif dalam pertemuan pemimpin-pemimpin agama sedunia. Bagi Gus Dur dan Syafi'i Ma'arif, Islam sebagai agama paling lengkap dan pamungkas mestinya menunjukkan sikap lebih terbuka dan teladan bagi agama-agama lain di dunia. Ketika Gus Dur menjabat presiden beberapa upaya perdamaian dilakukan, diantaranya upaya mencegah kehadiran Laskar Jihad di Maluku yang kemudian memperparah kondisi konflik, baik di Maluku maupun di Poso. Demikian juga upaya kesepakatan damai antara GAM dan RI, yang difasilitasi oleh Henry Dunant Center. Tetapi karena adanya beberapa tokoh militer dan sipil yang mencoba menciptakan gejolak dan ketidak-stabilan dalam negeri, maka upaya Gus Dur mengalami banyak kebuntuan. Laskar Jihad bahkan mendapat fasilitas suplai senjata dan amunisi yang diproduksi oleh Pindad, perusahaan negara yang memproduksi senjata. Juga tiadanya kekompakan para pimpinan tentara sehingga kesepakatan yang telah dilakukan gagal akibat berlanjutnya bentrokan antara GAM dan tentara Indonesia di Aceh. Hingga saat ini, Gus Dur menjadi ikon sebagai bapak pluralisme. Sementara Syafi'i Ma'arif melalui Ma'arif Institute masih aktif dalam dialog antar agama dan budaya.

Sebagai penduduk mayoritas, Muslim Indonesia juga aktif melakukan mediasi dan perdamaian antara Muslim di Thailand Selatan dan pemerintah Thailand, serta antara Muslim

¹⁶ M. Tito Karnavian, *Indonesian Top Secret: Membongkar Konflik Poso*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 212.

di Filipina Selatan dan pemerintah Filipina. Diantaranya, KH. Hasyim Muzadi dan beberapa tokoh NU. Melalui pendekatan Muslim tradisional dan tradisi melayu, KH. Hasyim Muzadi dan beberapa tokoh NU melakukan komunikasi aktif dengan tokoh-tokoh pesantren dan madrasah di kedua wilayah yang hingga saat ini masih bergolak. Pendekatan mereka lebih efektif dari pada pemerintah resmi, yang dianggap melakukan tindakan diskriminatif baik secara politik, ekonomi dan agama terhadap minoritas Muslim.

Pustaka Acuan

- Akbarzadeh, Shahram dan Abdullah Saeed (editor), *Islam and Political Legitimacy*, Oxon: Loutledge Curzon, 2003.
- Alatas, Ali, *A Voice for a Just Peace: A Collection of Speeches*, Singapura-Jakarta: ISEAS dan Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Appleby, R. Scott, *The Ambivalence of the Sacred Religion, Violence, and Reconciliation*. Pengantar Theodore M. Hesburgh, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2000.
- Baylis, John et.al., *The Globalization of World Politics an Introduction to International Relations*, Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Bertrand, Jacques, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Coser, Lewis, *The Functions of Social Conflict*, London: Routledge & Kegan Paul LTD, 1972.
- Djalal, Hasjim dan Dini Sari Djalal, *Seeking Lasting Peace in Aceh*, Jakarta: CSIS, 2006.
- Galtung, Johan, "A Structural Theory of Imperialism", dalam Richard Little dan

- Michael Smith, *Perspectives on World Politics*, New York: Routledge, 2006.
- Galtung, Johan, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, London: Sage Publications Ltd, 1996.
- Griffiths, Martin, *Fifty Key Thinkers in International Relations*, London: Routledge, 1999.
- ICG, *Indonesia: Jihadi Surprise in Aceh*, Asia Report No. 189 – 20 April 2010.
- Jemadu, Aleksius, *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Ledgerwood, Alison et. al . "Changing Minds: Persuasion in Negotiation and Conflict Resolution", dalam *The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*, editor Morton Deutsch, Peter T. Coleman dan Eric Colton Marcus, San Francisco: Jossey-Bass, 2006.
- M. Tito Karnavian, *Indonesian Top Secret: Membongkar Konflik Poso*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moran, Robert T. et.al. *Managing Cultural Differences: Global Leadership Strategies for the 21st Century*, Oxford: Butterworth Heinemann, 2007.
- Morgenthau, Hans J., *Politics among Nations the Struggle for Power and Peace*, Boston: McGraw Hill Higher Education, 2006.
- Salmi, Ralph H., Cesar Adib Majul dan George K. Tanham, *Islam and Conflict Resolution Theories and Practices*, Lanham: University Press of America, 1998.
- Sholeh, Badrus (ed.), *Budaya Damai Komunitas Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 2007.
- Tibi, Bassam, *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*, USA: Westview Press, 1990.
- Williams, Paul D. (ed.), *Security Studies an Introduction*, London: Routledge, 2008.